

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan dalam teknologi, terutama di sektor komunikasi, telah membawa masyarakat Indonesia memasuki fase baru yang ditandai oleh komunikasi yang efisien dan penuh dinamika. Mirip dengan ucapan lisan dan sinyal nonverbal, media massa kini menjadi elemen integral dalam interaksi manusia. Pada intinya, media berfungsi sebagai ekstensi dari gerak tubuh dan bahasa, yang mendorong evolusi struktur sosial manusia (Ramadhan & Kamalia, 2024). Kebutuhan masyarakat terpenuhi melalui diseminasi dan pemanfaatan informasi yang cepat oleh berbagai media massa, yang bertindak sebagai sumber utama informasi, pendidikan, pandangan, serta wawasan. Konten berita digital sebagian besar paralel dengan media cetak; namun, berita digital memberikan peluang bagi siapa saja untuk mengakses seluruh informasi yang diperlukan, mengingat kelimpahan dan kemudahan mendapatkan informasi serta sumbernya.

Kompas.com, yang awalnya dikenal sebagai Kompas Online, didirikan pada 14 September 1995 dan menjadi salah satu pionir dalam bidang media digital di Indonesia (Khotimah, 2024). Pada mulanya, Kompas Online semata-mata menghadirkan berita dari surat kabar harian Kompas, namun seiring waktu, platform ini mulai menampilkan pembaruan berita terkini secara berkelanjutan dan tidak lagi terbatas pada konten dari Kompas saja. Akhirnya, pada 29 Mei 2008, platform tersebut melakukan rebranding menjadi Kompas.com (Kurnia et al., 2021). Melalui rebranding ini, Kompas.com bertujuan untuk menegaskan

posisinya sebagai rujukan utama bagi praktik jurnalisme yang berkualitas di hadapan pembaca. Pada tahun 2019, meskipun banyak informasi yang belum diverifikasi, Kompas.com berhasil masuk ke dalam daftar 200 surat kabar terkemuka di dunia, menduduki peringkat kelima dalam klasifikasi yang dikeluarkan oleh surat kabar harian Kompas.

Dari perspektif publik, ada alasan yang jelas untuk perubahan penggunaan sumber informasi media daring menyajikan berita dengan kecepatan tinggi, akurat, dan sesuai permintaan. Situs web berita yang menyediakan pembaruan harian merupakan contoh sumber informasi yang modern dan mudah diakses (Fianto et al., 2023). Media massa memiliki dampak yang sangat besar terhadap perubahan sikap, opini, dan perilaku komunikasi. Karena preferensi pembaca terhadap berita daring yang terus berubah, media daring dipilih, yang mendorong para peneliti untuk melakukan investigasi terhadap platform daring kompas.com.

Pembingkaian isu oleh media sangat dipengaruhi oleh agenda dan nilai-nilai yang dipegang oleh media tersebut, sehingga dapat menghasilkan bias atau preferensi tertentu. Media dapat memilih untuk mengangkat aspek-aspek tertentu dari sebuah isu dan mengabaikan aspek lainnya, yang pada gilirannya akan membentuk persepsi publik tentang apa yang penting dan bagaimana menilai suatu kejadian. Dalam proses pembingkaian, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mempengaruhi apa yang dipikirkan audiens dan bagaimana mereka merespons isu tersebut (Oktafiany, n.d.). Dalam konteks pembahasan revisi UU Pilkada, misalnya, beberapa media mungkin mendukung langkah revisi dengan menonjolkan argumen efisiensi dan stabilitas politik, sementara yang lain menekankan dampaknya terhadap hak partisipasi rakyat.

Para Pengguna dapat memanfaatkan media sosial untuk meluncurkan inisiatif, terutama untuk meningkatkan perekonomian lokal. Pengguna media sosial dapat berperan sebagai produsen sekaligus konsumen dalam bertukar informasi. (Nurjanah, 2018). Namun, di balik kekuatan mobilisasi yang ditawarkan, media sosial juga menghadirkan tantangan, seperti penyebaran informasi palsu (hoaks) dan manipulasi opini publik. Konten yang viral di media sosial tidak selalu akurat, tetapi sering kali memiliki dampak besar dalam membentuk persepsi dan memotivasi tindakan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana media sosial digunakan dalam mobilisasi massa dan bagaimana pengaruhnya terhadap dinamika politik dan sosial (Sari & Zulkarnain, 2024).

Analisis wacana termasuk dalam ranah studi linguistik, oleh karena itu, untuk menghasilkan kajian yang mendalam, penting untuk memahami secara komprehensif teori wacana yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Misalnya, salah satu teknik dalam analisis wacana adalah semiotika (Hamad, 2007). Pada intinya, semiotika merupakan teori bahasa yang dikenal sebagai teori semiotik. Secara luas, analisis wacana menelaah penerapan bahasa dalam konteks keseharian, baik secara verbal maupun tertulis, sebagai objek utama investigasi atau eksplorasi.

Analisis wacana, yang dapat melengkapi analisis konten kualitatif dan menutupi kelemahannya, merupakan analisis konten yang lebih kualitatif dan merupakan alternatif bagi analisis konten kualitatif (Ahmad, 2018). Pendekatan fenomenologis terhadap analisis wacana berasumsi bahwa subjek memiliki intensi yang memengaruhi bahasa dan wacana mereka. Dari perspektif ini, subjek memainkan peran kunci, karena mereka dapat menentukan apa yang mereka

ungkapkan, apa intensi mereka, dan bagaimana intensi tersebut diungkapkan—baik secara eksplisit maupun implisit.

Perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia selalu menjadi isu yang sarat dengan muatan politik dan sosial. Setelah pelaksanaan pemilihan langsung sejak reformasi, muncul wacana revisi Undang-Undang Pilkada untuk mengembalikan sistem pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini memunculkan kontroversi karena menyentuh fundamental demokrasi di Indonesia yaitu keterlibatan langsung rakyat dalam memilih pemimpin daerah mereka. Keterlibatan ini sebelumnya dianggap sebagai puncak dari pencapaian reformasi, dengan tujuan untuk memperkuat demokrasi partisipatif dan mendekatkan pemimpin dengan rakyat (Simanjuntak, 2017).

Dalam konteks komunikasi, revisi UU Pilkada ini merupakan peristiwa penting yang memicu diskursus publik secara luas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga turut mempercepat dan memperluas penyebaran isu ini. Konten berita, opini, dan diskusi yang berkembang di media-media tersebut memainkan peran penting dalam memengaruhi pandangan masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra terhadap revisi ini. Konteks komunikasi ini memperlihatkan adanya pertarungan antara pihak-pihak yang ingin menjaga demokrasi partisipatif dengan mereka yang mendukung perubahan menuju mekanisme pemilihan tidak langsung (Yusuf, 2011). Kondisi ini menjadi menarik untuk dikaji dalam perspektif komunikasi politik karena melibatkan proses persuasi, argumentasi, dan penggunaan media sebagai alat komunikasi dan pembentukan opini publik.

Revisi UU Pilkada memicu polemik yang kompleks di tengah masyarakat, terutama karena menyentuh hak rakyat dalam berpartisipasi secara langsung dalam pemilihan pemimpin (Nugraha & Mulyandari, 2016). Sistem pemilihan langsung dipandang sebagai sarana bagi rakyat untuk memiliki kendali langsung terhadap kepemimpinan daerah, dan penghapusan sistem ini dipandang mengancam hak partisipasi politik mereka. Polemik ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana media, terutama media berita online, membingkai informasi terkait revisi ini (Setiawan, 2021).

Media memiliki kemampuan untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap revisi UU Pilkada, baik dengan mengangkat sisi positif dari revisi maupun dengan menyoroti potensi dampak negatifnya terhadap demokrasi. Berbagai media memiliki orientasi yang berbeda-beda dalam pemberitaan terkait isu ini. Ada yang cenderung mendukung pemerintah dengan memaparkan keuntungan revisi, namun ada pula yang mengkritisi kebijakan ini dengan menonjolkan potensi kerugian yang akan dialami masyarakat. Pembingkai berita ini pada akhirnya membentuk persepsi publik dan mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang pemerintah serta sistem politik yang ada (Aldiva et al., 2024).

Resistensi terhadap revisi UU Pilkada bukan hanya datang dari partai politik oposisi atau tokoh-tokoh publik, tetapi juga dari kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil. Sejak masa reformasi, mahasiswa telah dikenal sebagai kekuatan pendorong perubahan sosial dan politik di Indonesia (Mustafidah & Purwaningsih, 2016). Dalam kasus revisi UU Pilkada, mahasiswa kembali menunjukkan peran penting mereka dengan mengorganisir aksi-aksi protes dan menyuarakan

penolakan terhadap kebijakan yang dianggap mengancam hak demokratis masyarakat. Bersama dengan kelompok masyarakat sipil lainnya, mahasiswa aktif menggelar unjuk rasa, kampanye media sosial, serta diskusi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mempertahankan sistem pemilihan langsung.

Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) telah menjadi isu yang sangat kontroversial dalam politik Indonesia. Sebagai lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memainkan peran krusial dalam merancang dan mendorong revisi undang-undang (Kartika, 2024). DPR telah mengembangkan berbagai wacana untuk mendukung dan mempertahankan perubahan dari pemilihan langsung menjadi pemilihan tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wacana yang dibangun oleh DPR cenderung berfokus pada argumentasi tentang efisiensi dan stabilitas. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah bahwa pilkada langsung cenderung membutuhkan biaya politik yang tinggi, baik dari sisi pemerintah maupun calon kepala daerah (Putri & Qodir, 2017). Biaya yang besar ini sering kali dikaitkan dengan maraknya praktik politik uang, korupsi, serta ketidakstabilan politik di daerah.

Wacana perlawanan dari mahasiswa dan masyarakat ini menjadi sangat penting dalam memahami dinamika komunikasi politik yang terjadi di Indonesia (Fajri & Fadillah, 2017). Media berita online memainkan peran kunci dalam menyampaikan wacana resistensi ini kepada publik. Bagaimana media membingkai wacana ini akan sangat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap revisi UU Pilkada, serta bagaimana mereka menilai pemerintah dan DPR dalam proses demokrasi. Media massa, termasuk media berita online, memiliki

kekuatan besar dalam membentuk realitas sosial melalui pembingkaihan (framing) isu (Yullah, 2016).

Menurut teori framing, cara informasi disajikan dapat memengaruhi interpretasinya oleh audiens. Teori ini menyatakan bahwa media tidak hanya menentukan topik mana yang penting, tetapi juga bagaimana topik tersebut disajikan. Dalam konteks politik, media bertindak sebagai perantara, memengaruhi opini publik tidak hanya dengan menyampaikan fakta melalui pemberitaan mereka.

Dalam beberapa dekade terakhir, media sosial telah memainkan peran penting dalam mobilisasi massa untuk tujuan sosial dan politik. Media sosial memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam debat publik, menyampaikan pandangan mereka, dan bahkan memulai gerakan sosial tanpa batasan waktu dan tempat. Kecepatan dan jangkauan media sosial memungkinkan pesan-pesan resistensi tersebar luas dan direspons secara cepat oleh masyarakat. Selain itu, media sosial juga memungkinkan adanya interaksi langsung antara pengguna, yang memperkuat solidaritas dan meningkatkan motivasi untuk bertindak (Nasution & Imsar, 2023).

Pembingkaihan wacana politik dalam media juga berperan penting dalam membentuk persepsi publik tentang revisi ini. Beberapa media mungkin mengedepankan narasi yang mendukung revisi dengan menyoroti aspek efisiensi dan penghematan biaya, sementara media lainnya mengkritisi motif politik di balik revisi yang dinilai hanya menguntungkan segelintir elite. Pilkada langsung memungkinkan masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin mereka, memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi politik, dan memperkuat akuntabilitas pemimpin daerah terhadap konstituennya (Tuhana & Muryanto,

2010). Namun, revisi UU Pilkada yang mengembalikan kewenangan pemilihan kepada DPRD mengubah dinamika demokrasi tersebut.

Dalam menjalankan riset ini, pendekatan kualitatif digunakan dengan cara menganalisis data dari media online *kompas.com*. Dengan mengumpulkan sudut pandang yang berbeda, diharapkan gambaran yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan mengenai dinamika politik di tingkat lokal. Selama beberapa tahun terakhir, penelitian-penelitian mengenai politik lokal dan dampaknya telah menunjukkan berbagai hasil yang menarik. Misalnya, didapatkan pemahaman bahwa stabilitas politik lokal sangat bergantung kepada legitimasi yang diperoleh pemimpin melalui proses pemilihan yang berlangsung dengan baik. Sumber legitimasi ini tidak hanya berasal dari hasil pemilihan, namun juga dari transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses politik (Satria & Rahman, 2023). Jika proses yang katanya demokratis ini terhalang oleh berbagai mekanisme yang tidak adil, maka dampaknya terhadap stabilitas politik dapat menjadi sangat signifikan.

Pemilihan *Kompas.com* sebagai objek penelitian didasarkan pada posisinya sebagai salah satu media daring arus utama yang memiliki tingkat kredibilitas dan pengaruh tinggi dalam membentuk opini publik di Indonesia. Sebagai media yang dikenal mengedepankan jurnalisme berbasis fakta, verifikasi, dan perspektif kebangsaan, *Kompas.com* memiliki peran strategis dalam mengonstruksi wacana isu-isu politik nasional, termasuk revisi Undang-Undang Pilkada 2024. Posisi ini menjadikan *Kompas.com* relevan untuk dianalisis karena wacana yang dibangun

tidak hanya merefleksikan peristiwa, tetapi juga mengandung nilai, sikap, dan sudut pandang tertentu terhadap dinamika demokrasi dan konstitusionalitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana wacana tentang pemberitaan penolakan revisi UU Pilkada 2024 di media online Kompas.com?
2. Bagaimana konstruksi wacana pemberitaan penolakan Revisi UU Pilkada 2024 pada media online Kompas.com berdasarkan analisis wacana model Teun A. Van Dijk?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisa bentuk serta pola wacana yang dibangun Kompas.com dalam liputan penolakan revisi Undang-Undang Pilkada tahun 2024. Secara lebih spesifik, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana framing pemberitaan diterapkan melalui struktur wacana menurut Teun A. van Dijk, yang meliputi struktur makro (penentuan topik utama), superstruktur (skema dan alur pemberitaan), serta struktur mikro (pilihan leksikal, kalimat, dan penekanan makna). Melalui analisis tersebut, hasil penelitian ini mengungkap kecenderungan representasi aktor, peristiwa, dan kepentingan tertentu dalam pemberitaan Kompas.com terkait revisi UU Pilkada.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang diantisipasi penulis dari penelitian ini meliputi dimensi praktis dan teoritis. Penjelasan lebih mendalam tentang kedua aspek manfaat tersebut akan dibahas secara bertahap sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidang penelitian. Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini meliputi:

- 1 Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori komunikasi politik, terutama dalam memahami bagaimana komunikasi antar aktor politik, pemerintah, dan masyarakat memengaruhi persepsi dan respon terhadap isu politik.
- 2 Memberikan wawasan tentang bagaimana media memframing isu penolakan RUU Pilkada dan dampaknya terhadap persepsi publik, serta bagaimana framing tersebut dapat memengaruhi stabilitas politik di tingkat lokal.
- 3 Membantu memperkaya teori opini publik, dengan menjelaskan bagaimana media dan komunikasi politik membentuk opini masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, serta bagaimana hal ini berdampak pada kestabilan politik daerah.

Menambah pemahaman tentang bagaimana komunikasi dalam situasi krisis dapat memengaruhi persepsi masyarakat dan aktor politik terhadap legitimasi kebijakan serta stabilitas politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis mengacu pada keuntungan yang dapat segera diimplementasikan untuk kepentingan praktis. Adapun manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini mencakup, di antaranya:

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki strategi komunikasi politik mereka, terutama dalam menyampaikan kebijakan yang kontroversial, agar lebih diterima oleh masyarakat dan mengurangi potensi konflik politik.
2. Untuk meningkatkan komunikasi publik, dengan fokus pada cara merespon penolakan kebijakan serta membangun dialog dengan masyarakat dan kelompok-kelompok politik di daerah.
3. Masyarakat akan lebih memahami proses legislasi dan dampak dari kebijakan, sehingga dapat lebih terlibat secara aktif dan informatif dalam politik lokal.
4. Dapat membantu pemerintah daerah dalam mengelola isu-isu politik yang berpotensi menimbulkan konflik melalui komunikasi yang lebih terbuka, transparan, dan responsif terhadap kritik atau penolakan dari masyarakat.